

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Magelang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Magelang

Kota Magelang yang memiliki luas 18,54 km² adalah sebuah kota yang berbentuk linear dengan kecenderungan arah utara-selatan yang dominan disebabkan oleh kuatnya jalur transportasi yang menghubungkan Yogyakarta dan Semarang. Magelang Kota Sejuta Bunga memiliki filosofi bahwa Kota Magelang adalah Tuin Van Java (Kota kebun/Tamannya Pulau Jawa) yang terletak di 110°12'30" – 110°12'52" BT dan 7°26'18" – 7°30'9" LS serta berada pada ketinggian 380 meter di atas permukaan laut.

Kota Magelang memiliki batas-batas :

- Utara : Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
- Timur : Sungai Elo / Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
- Selatan : Kecamatan Mertoyudan / Kabupaten Magelang
- Barat : Sungai Progo / Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

Posisi Kota Magelang yang strategis di jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung dan pada persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta–Borobudur– Kopeng-Ketep Pass-Dataran Tinggi Dieng menjadikannya sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu sebagai

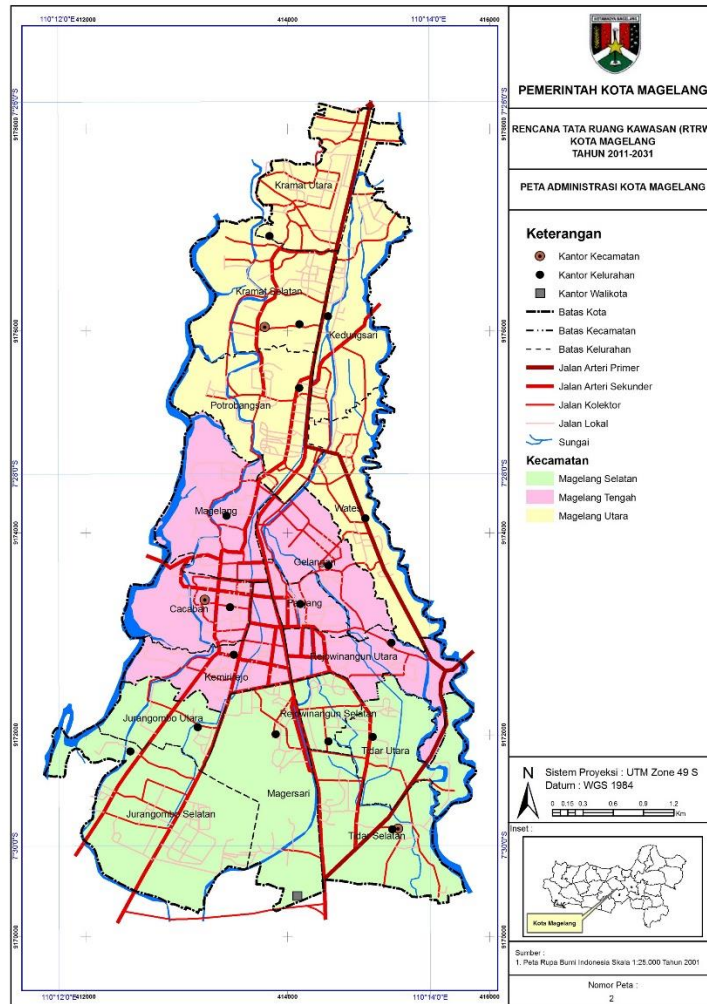
Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi.

Keberadaan Gunung Tidar merupakan kekhasan (landmark) Kota Magelang yang tidak dimiliki oleh banyak daerah lainnya. Selain sebagai kawasan hutan lindung, lokasi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai arena rekreasi alam dan wisata spiritual. Nuansa spiritual sebenarnya secara tradisional pada hari-hari tertentu sudah berjalan selama ini. Karena itu perlu diadakan penggalian terhadap kandungan keluhuran nilai spiritualnya yang merupakan warisan nenek moyang (local wisdom), untuk kemudian diaktualisasikan dan direlevansikan dengan konteks kondisi yang tengah berjalan.

2.1.2 Kondisi Wilayah Administrasi

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kota Magelang



Sumber: RTRW Kota Magelang

Kota Magelang memiliki luas wilayah 18,5364 km². Secara administratif Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan, 17 kelurahan, jumlah RW sebanyak 192 RW dan RT sebanyak 1.026 RT. Kecamatan yang mempunyai luas terbesar adalah Kecamatan Magelang Selatan dengan luas 7,1315 km² atau 38,47% dari luas Kota Magelang, sedangkan kecamatan

yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Magelang Tengah dengan luas 5,1011 km² atau 28,17% dari luas Kota Magelang.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Magelang

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Magelang Selatan	7,1315	38,47
2.	Magelang Tengah	5,1011	28,17
3.	Magelang Utara	6,3037	33,82
	Jumlah	18,5364	100,00

Sumber : Kota Magelang dalam Angka, 2018.

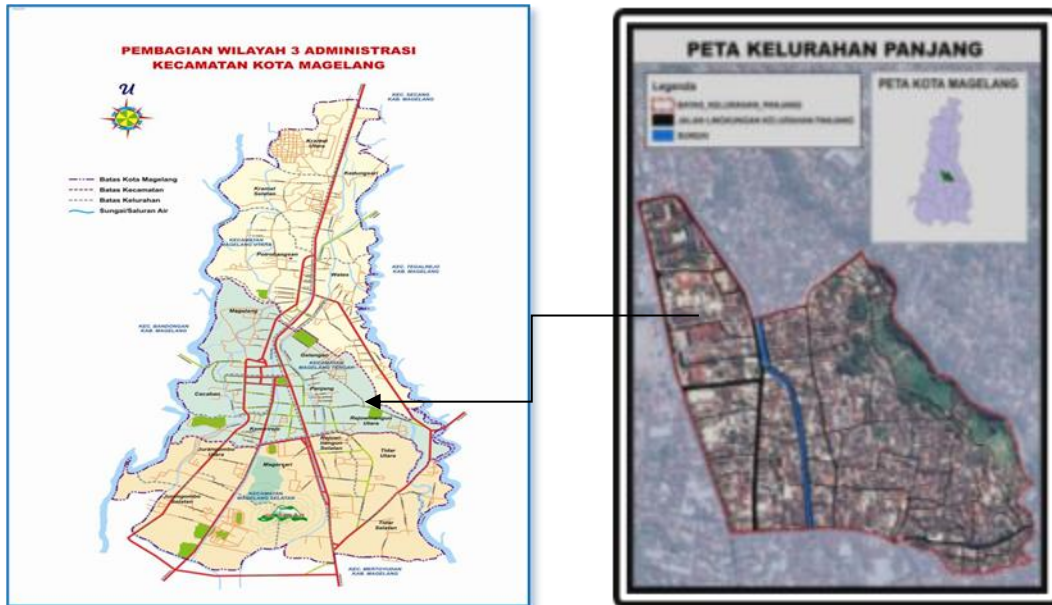
2.2 Gambaran Umum Kelurahan Panjang

2.2.1 Letak Geografis

Secara administrasi Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Gelangan
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
3. Sebelah Timur : Kelurahan Gelangan
4. Sebelah Barat : Kelurahan Cacaban

Gambar 2.2
Peta Administrasi Wilayah



Sumber : FGD TIPP KOTAKU Tahun 2016

Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang berada di ketinggian 380,00 meter di atas permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 0,345 Km² (34,5 Hektare) atau 6,59 % prosentase terhadap luas Kecamatan Magelang Tengah atau 1,9 % prosentase terhadap luas Kota Magelang (18.12 km²). Kelurahan Panjang terdiri dari 8 RW (Rukun Warga) dan 60 RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) curah hujan tahunan rata – rata di Kelurahan Panjang pada Tahun 2015 berkisar antara 1000-3000 mm.

2.2.2 Data Profil Permasalahan Lingkungan

2.2.2.1 Keteraturan Bangunan

Seperti pada wilayah perkotaan pada umumnya yang memang terbilang cukup padat penduduknya, yang mana hal tersebut mempengaruhi pada keteraturan hunian yang menjadi rendah karena tidak ada aturan bersama yang menjaga keteraturan bangunan. Sehingga penduduk membangun bangunannya sesuai dengan kehendak sendiri yang mengakibatkan tata bangunannya tidak teratur. Salah satu contoh indikatornya, di Kelurahan Panjang banyak ditemukan lebar jalan yang tidak sama padahal masih berada di 1 jalur. Di satu titik lebar jalan tersebut cukup lebar tetapi di titik lain pada jalur yang sama lebar jalannya lebih sempit.

Berdasarkan P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman), suatu bangunan hunian dikatakan teratur jika memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Bangunan tersebut mempunyai akses langsung ke jalan yang lebarnya minimal 1,5 m.
2. Bangunan tersebut menghadap ke jalan yang lebarnya minimal 1,5 m.
3. Jika ada sungai di sekitar bangunan, maka bangunan itu juga menghadap ke sungai tersebut dan tidak berada di atas danau/laut/rawa/dll.
4. Bangunan tersebut tidak di atas sempadan jalan/sungai/laut/danau,dll.

5. Tidak berada di daerah pembuangan limbah pabrik, atau di bawah SUTET.

Satu syarat saja tidak terpenuhi maka bangunan hunian tersebut tidak teratur.

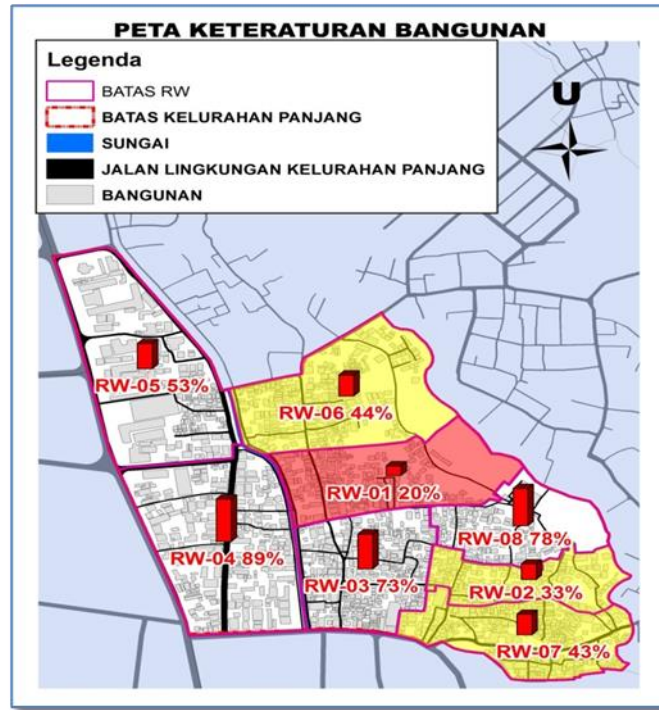
Berdasarkan kriteria keteraturan bangunan hunian tersebut maka tingkat keteraturan hunian di masing-masing RW di Kelurahan Panjang dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Keteraturan Bangunan

RW	Kepala Rumah Tangga	KETERATURAN BANGUNAN	
		Jumlah Keteraturan Bangunan (Unit rumah tangga)	Rata-Rata Persentase Keteraturan Bangunan (%)
1	195	40	20%
2	148	55	33%
3	185	128	73%
4	131	119	89%
5	87	49	56%
6	200	82	44%
7	205	94	43%
8	107	78	78%
	1258	645	51%

Sumber data : Baseline P2KKP 2015

Gambar 2.3
Keteraturan Bangunan



Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Panjang 2020-2024

Dapat dilihat pada tabel dan peta di atas bahwa wilayah yang tingkat keteraturan bangunannya rendah di Kelurahan Panjang berada di RW 1, 2, 6, 7. Hal ini disebabkan karena banyak bangunan hunian yang tidak menghadap ke jalan yang lebarnya minimal 1,5 m. Jalan di lingkungan tersebut sebagian besar hanya berukuran kurang dari 1,5 m sehingga tidak sesuai dengan standar kelayakan keteraturan bangunan hunian.

Meskipun berada di daerah perkotaan tetapi masih ditemukan adanya rumah dalam kondisi yang sangat membutuhkan perbaikan/renovasi, yang tersebar di Kelurahan Panjang. Dinding hunian terbuat dari papan atau bilik bambu, atap seng. Berikut beberapa gambar contoh rumah yang memerlukan perbaikan yang berada di Kelurahan Panjang.

Gambar 2.4
Kondisi Bangunan



Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Panjang 2020-2024

Menurut P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman), suatu bangunan hunian dikatakan layak untuk dihuni dilihat dari 2 hal, antara lain :

1. Kondisi bangunan hunian. Kondisi bangunan yang layak dihuni berdasarkan standar minimal P2KKP dilihat dari Atap, Lantai dan Dinding dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Atap tidak bocor bukan terbuat dari bahan asbes.
 - b. Dinding kokoh dan tidak rusak.
 - c. Lantai bukan dari tanah.
2. Luas bangunan hunian. Sesuai dengan standar DPU, bahwa masing-masing jiwa yang tinggal pada hunian tersebut berhak mendapatkan luas lantai

minimal 7,2 m². Misalkan di dalam suatu bangunan hunian ada 2 jiwa maka luas lantai bangunan hunian tersebut minimal 14,4 m². Jika luas tanah yang dimiliki tidak seluas yang seharusnya, maka pemenuhan standar minimal luas lantai per jiwa bisa dilakukan dengan melakukan penambahan lantai ke arah vertikal/atas (rumah tingkat).

Berdasarkan kriteria tersebut maka kondisi kelayakan lantai untuk masing-masing jiwa dan kondisi kelayakan bangunan hunian dari masing-masing RW di Kelurahan Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2.2.2.2 Jalan Lingkungan

Hampir semua jalan lingkungan di Kelurahan Panjang sudah diperkeras dengan aspal ataupun dengan paving. Bahkan gang-gang penghubung antara rumah depan dengan rumah belakangnya sudah banyak yang diperkeras. Ukuran lebar jalan juga bervariasi mulai dari yang lebih dari 4 m sampai ke yang kurang dari 1,5 m.

Tabel 2.3

Rasio Jaringan Jalan Lebar Min 1,5 m Dengan Total Jaringan Jalan

RW	Estimasi Panjang Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (Meter)	Estimasi Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1,5 meter (meter)	Estimasi Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1.5 meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Rata-Rata Jangkauan Jaringan Jalan Lingkungan yang layak (%)
1	1767	1720	1720	98%
2	1842	905	905	52%
3	1238	943	943	83%
4	2650	2650	2650	100%
5	1000	800	800	78%
6	5950	5950	5850	99%
7	2965	1850	1850	58%

8	1650	1550	1550	94%
	19,062	16,368	16,268	83%

Sumber data : Baseline P2KKP 2015

Berdasarkan tabel data P2KKP di atas ada dua wilayah RW yang jangkauan jalan lingkungan berukuran minimal 1,5 m yang masih rendah yaitu RW 2 sebesar 52% dan RW 7 sebesar 58% dari total jaringan jalan yang ada. Itu Artinya wilayah-wilayah tersebut jalan lingkungan yang ada masih banyak yang sempit atau lebarnya masih di bawah 1,5 m.

Dari sudut pandang kondisi fisik jalan, persentase kondisi fisik jalan Kelurahan Panjang yang lebarnya minimal 1,5 m yang sudah diperkeras dan tidak rusak cukup tinggi yaitu sebesar 97%. Kondisi tersebut untuk masing-masing wilayah RW dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Kondisi Fisik Jalan Dengan Lebar Min 1,5 m

RW	Estimasi Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1.5 meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak (%)
1	1720	1720	100%
2	905	905	100%
3	943	818	87%
4	2650	2650	100%
5	800	800	100%
6	5850	5850	100%
7	1850	1850	100%
8	1550	1400	90%
	16,268	15,993	97%

RW	Estimasi Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1.5 meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak (%)
----	--	--	--

Sumber data : Baseline P2KKP 2015

Gambar 2.5

Peta Kondisi Jalan Lingkungan



Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Panjang 2020-2024

Pada tabel di atas bisa disimpulkan bahwa di wilayah RW 3 Kelurahan Panjang ada jalan yang lebarnya min 1,5 m yang sudah diperkeras yang rusak sebesar 13% atau kurang lebih 122 m dari total panjang jalan yang lebarnya min 1,5 m. Meskipun jalan yang ada sudah diperkeras semua, tetapi ada komponen yang cukup penting yang kurang mendapat perhatian, yaitu perawatan. Di beberapa titik seperti di RW 1, 4, 8 ditemukan jalan yang banyak ditumbuhi oleh rumput, ada juga

jalan paving yang beberapa blok pavingnya hilang atau rusak, senderan jalan yang sudah rusak dan runtuh, dan jalan yang ambles.

2.2.2.3 Drainase

Permasalahan saluran drainase di Kelurahan Panjang secara umum terbagi menjadi 2 masalah utama, yaitu :

1. Saluran drainase menjadi satu dengan saluran untuk membuang limbah cair rumah tangga.

Hampir semua jaringan drainase di Kelurahan Panjang berfungsi dengan normal. Hanya saja yang menjadi masalah adalah drainase tersebut tidak hanya berfungsi sebagai saluran pembuangan air limpasan hujan tetapi juga berfungsi sebagai saluran untuk membuang air limbah keluarga dan sampah. Hal tersebut menjadi masalah karena saluran drainase biasanya berujung di sungai supaya limpasan air hujan yang datang bisa diteruskan ke sungai. Jika saluran tersebut juga digunakan untuk membuang limbah cair keluarga dan sampah maka limbah dan sampah tersebut juga ikut terbang ke sungai yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan air sungai.

2. Saluran drainase tertutup oleh jalan.

Banyak saluran drainase di Kelurahan Panjang yang tertutup akibat pengerasan jalan. Ada yang tertutup oleh paving ada juga yang tertutup oleh aspal. Hal ini akan menjadi masalah ketika misalnya terjadi penyumbatan saluran di drainase yang tertutup oleh aspal atau paving tersebut.

Dari segi kondisi fisik drainase, rata-rata di masing-masing wilayah masih memiliki kondisi yang cukup memadai. Hanya di beberapa wilayah RW saja yang kondisinya kurang memadai, yaitu di RW 8 dan RW 3. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel kondisi fisik drainase masing-masing RW Kelurahan Panjang di bawah ini :

Tabel 2.5
Kondisi Drainase

RW	Panjang Total Drainase (meter)	Panjang Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	Rata-Rata Persentase Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (%)
1	2220	2220	100%
2	655	655	100%
3	1008	723	76%
4	1940	1940	100%
5	500	500	100%
6	3330	3330	100%
7	1845	1720	94%
8	1600	900	60%
	13,098	11,988	91%

Sumber data : Baseline P2KKP 2015

2.2.2.4 Sanitasi

Pembuangan limbah cair keluarga belum mempunyai jaringan khusus. Masing-masing rumah/bangunan meneruskan saluran pembuangan limbah cairnya ke saluran drainase yang berujung ke sungai, sehingga akan mencemari sungai dan lingkungannya.

Sedangkan untuk limbah padat, hampir semua penduduk Kelurahan Panjang mempunyai jamban sebagai fasilitas untuk membuangnya. Berdasarkan data Baseline P2KKP sebanyak 98% rumah tangga (1223 rumah tangga) dari total rumah tangga yang ada (1250 rumah tangga) yang ada dapat mengakses jamban baik jamban sendiri maupun jamban komunal. Itu artinya masih ada 27 rumah tangga yang belum mempunyai jamban sendiri atau tidak bisa mengakses jamban komunal.

Tabel 2.6
Jumlah Rumah Tangga Yang Mempunyai Jamban

RW	Kepala Rumah Tangga	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)	Rata-Rata Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (%)
1	195	190	97%
2	148	147	100%
3	185	185	100%
4	131	131	100%
5	83	83	100%
6	199	188	96%
7	202	198	98%
8	107	101	97%
	1,258	1,223	98%

Sumber data : Baseline P2KKP 2015

Berdasarkan tabel di atas persentase terendah rumah tangga yang memiliki jamban sendiri berada di RW 6 atau sebanyak 18 rumah tangga yang belum mempunyai jamban. Tetapi kepemilikan jamban tersebut belum melihat apakah jamban yang dimiliki sudah sesuai dengan standar kelayakan. Berdasarkan standar kelayakan, jamban yang dimiliki harus sudah berleher angsa dan terhubung ke

septic-tank dengan struktur bangunan yang sudah memenuhi standar kesehatan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka berikut bisa dilihat seberapa banyak rumah tangga yang sudah mempunyai jamban yang sesuai dengan persyaratan teknis pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jamban Yang Sesuai Dengan Persyaratan Teknis

RW	Kepala Rumah Tangga	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (Unit rumah tangga)	Rata-Rata Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (%)
1	195	141	80%
2	148	130	81%
3	185	174	93%
4	131	131	100%
5	83	48	54%
6	199	166	90%
7	202	108	44%
8	107	90	90%
	1,258	988	79%

Sumber data : Baseline P2KKP 2015

Berdasarkan tabel dan peta di atas dapat disimpulkan bahwa kurang lebih setengah dari rumah tangga yang ada di RW 5 dan RW 7 memiliki jamban yang belum sesuai dengan persyaratan teknis. Jamban yang dimiliki tidak terhubung ke septic-tank tetapi limbah tersebut langsung dibuang ke sungai atau ke saluran drainase.

2.2.2.5 Sumber Air Bersih

Air merupakan komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan air

bersih yang cukup. Di wilayah perkotaan pada umumnya untuk memperoleh air bersih yang cukup untuk masing-masing individu bukanlah menjadi suatu masalah. Hampir semua individu yang tinggal sudah memperoleh kecukupan kebutuhan air bersih untuk digunakan sehari-hari.

Begitu juga di Kelurahan Panjang yang terletak di Jantung Kota Magelang, semua rumah tangga sudah tercukupi volume kebutuhan airnya yang mana standarnya adalah masing-masing individu mendapatkan 60 liter per hari meskipun di beberapa wilayah membutuhkan usaha ekstra untuk memenuhinya. Di beberapa wilayah di Kelurahan Panjang yang kebutuhan volume air untuk kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi karena debit air dari ledeng tidak mampu untuk memenuhinya, warga mencoba untuk memperoleh air dengan membuat sumur komunal yang sesuai dengan standar kelayakan (sumur terlindung) dan mendirikan menara air untuk menampung air yang telah disedot, yang kemudian air tersebut didistribusikan ke masing-masing rumah tangga yang membutuhkan.

Meskipun dari sisi volume sudah terpenuhi, tetapi yang perlu dipertimbangkan kembali adalah dari mana/sumber air tersebut didapatkan. Menurut Program P2KKP, sumber air yang layak untuk digunakan adalah air yang berasal dari :

1. Ledeng
2. Sumur bor/sumur pompa/sumur terlindung/mata air yang jaraknya dengan penampungan tinja/kotoran terdekat min 10 m
3. Air hujan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka kelayakan sumber air yang diperoleh masing-masing rumah tangga di masing-masing RW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Sebaran dan Kecukupan Air Bersih

RW	Kepala Rumah Tangga	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unit rumah tangga)	Rata-Rata Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (%)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (Unit rumah tangga)	Rata-Rata Persentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (%)
1	195	158	81%	195	100%
2	148	123	90%	148	100%
3	185	166	88%	185	100%
4	131	131	100%	131	100%
5	83	83	100%	83	100%
6	199	186	96%	199	100%
7	202	183	89%	202	100%
8	107	103	96%	107	100%
	1,258	1,133	92%	1,250	100%

Sumber data : Baseline P2KKP 2015

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa belum semua rumah tangga (masih ada 37 rumah tangga) di wilayah RW 1 mendapatkan air bersihnya sesuai dengan standaryang telah disebutkan di atas. Meskipun di beberapa RT sudah menginisiasi untuk membuat sumur dan menara air komunal yang sudah disinggung sebelumnya, tetapi karena beberapa faktor seperti keterbatasan debit air pada sumur yang ada, jumlah sumur dan menara yang baru ada di beberapa titik, butuh anggaran yang cukup besar untuk menambah sumur dan menara seperti tadi, mengakibatkan daya

jangkau yang belum merata ke semua rumah tangga yang ada di wilayah itu. Sehingga rumah tangga-rumah tangga yang belum tersentuh mencari sumber air alternatif lain yang tidak sesuai dengan standar kelayakan untuk memenuhi kebutuhan airnya seperti sumur yang tidak terlindungi, dan lainnya.

2.2.2.6 Sampah

Kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan yang rendah merupakan salah satu faktor seseorang membuang sampah di sembarang tempat tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Meskipun sudah ada layanan pengangkutan baik dari swadaya maupun dari pemerintah tetapi karena belum semua wilayah terjangkau sehingga membuat rumah tangga yang berada di wilayah tersebut membuang sampah sembarangan atau dengan cara yang tidak layak seperti dikubur tanpa dipilah terlebih dahulu mana sampah yang bisa terurai mana yang tidak, sampah dibakar, dibuang ke selokan/drainase/sungai/lahan kosong.

Gambar 2.6
Kondisi Persampahan



Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Panjang 2020-2024

Kontur tanah di Kelurahan Panjang pada umumnya tidak rata. Ada wilayah yang tinggi ada yang rendah. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi rumah tangga yang berada di wilayah yang rendah (wilayah timur kelurahan), karena wilayah tersebut menjadi muara pembuangan untuk wilayah hunian yang berada di atasnya/yang lebih tinggi. Sampah-sampah yang dibuang ke selokan oleh rumah tangga-rumah tangga yang berada di wilayah atas berkumpul menjadi 1 di saluran wilayah bawah.

Tabel 2.9
Pengangkutan Sampah Rumah Tangga

RW	Kepala Rumah Tangga	Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (Unit rumah tangga)	Rata-Rata Persentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (%)
1	195	195	100%
2	148	102	86%
3	185	185	100%
4	131	131	100%
5	83	83	100%
6	199	166	90%
7	202	171	82%
8	107	65	68%
	1,250	1098	91%

Sumber data : Review Data Baseline P2KKP 2015

Pada tabel di atas sebanyak 42 rumah tangga (68% dari total 107 rumah tangga) yang berada di RW 8 tidak membuang sampah di tempat sampah yang seharusnya. Berikut contoh foto kondisi pembuangan sampah di Kelurahan Panjang beserta lokasinya di peta :

Gambar 2.7
Peta Pembuangan Sampah



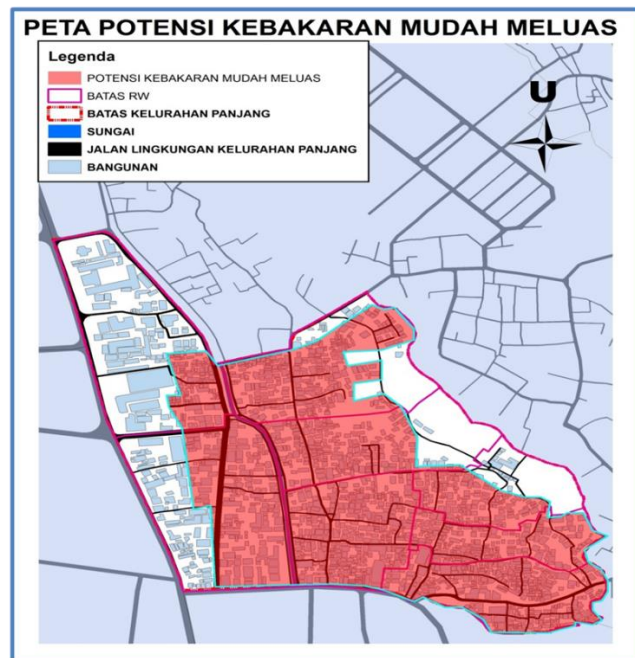
Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Panjang 2020-2024

2.2.2.7 Potensi Bencana

Kebakaran mudah meluas dan susah dipadamkan. Kondisi permukiman yang padat yang jarak antara satu bangunan dengan bangunan yang lain membuat kebakaran akan dengan mudah menyebar ke bangunan di dekatnya. Sedangkan Kelurahan Panjang tidak mempunyai sarana prasarana yang mendukung / cukup untuk memadamkan api secara cepat seperti hidran. Kondisi tersebut diperparah dengan jalan yang sempit sehingga mobil damkar tidak bisa masuk. Selain itu di beberapa wilayah khususnya yang padat jauh dari sumber air terbuka (sungai, kolam, mata air, dll).

Gambar 2.8

Potensi Rawan Kebakaran



Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Panjang 2020-2024

2.3 Gambaran Umum Program Kampung Teduh

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan 0 hektare kawasan kumuh di tahun 2020, pemerintah Kota Magelang mencanangkan sebuah konsep baru dalam hal penataan wilayah yang disebut dengan program Kampung Teduh (Tematik, Terbuka, dan Hijau). Implementasi program Kampung Teduh dilaksanakan dengan menggandeng seluruh kekuatan wilayah melalui bentuk kolaborasi dari mulai pemerintah kota, seluruh organisasi perangkat daerah, hingga ke masyarakat setempat dan dunia usaha. Konsep program Kampung teduh ini tercetus dari diskusi intens di wilayah Badan Perencanaan Daerah (bappeda) Kota Magelang berkaitan dalam upaya perwujudan gerakan 100-0-100.

Program Kampung Teduh di implementasikan berdasar pada tiga prinsip pendekatan yaitu : fokus, tuntas, dan berupaya mengubah wajah kampung serta konsep kolaborasi menginspirasi diskusi-diskusi selanjutnya untuk penanganan serta pencegahan munculnya kawasan kumuh baru di Kota Magelang. Program kampung Tematik, Terpadu dan Hijau (Kampung Teduh) merupakan upaya mencapai sinergitas pencegahan kawasan permukiman kumuh oleh para *stakeholder* agar menjadi terpadu dan bersinergi satu dengan yang lain sehingga pelaksanaan program-program tersebut dapat efektif, efisien dan akurat. Berdasarkan pembahasan mengenai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut, dan didukung dengan kolaborasi yang ada, maka dicetuskan konsep Kampung Teduh (Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sekilas Informasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), n.d.)

Untuk mewujudkan Program kampung Teduh, maka suatu kampung perlu memenuhi parameter-parameter sebagai berikut:

- a. Riil Bukan Angan-Angan
- b. Sudah ada potensinya
- c. Adanya tokoh penggerak
- d. Komitmen Keterlibatan
- e. Efektif Aplikatif
- f. Sustainable
- g. Kewenangan

Program Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau (Kampung Teduh) dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Tematik, Berdasarkan Potensi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Setempat
- b. Terpadu, Terpadu Antara Berbagai *Stakeholder* Dan Lintas Sektoral
- c. Hijau, Mendukung Slogan “Magelang Kota Sejuta Bunga”, Program Kampung Organik Dan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan Program Kampung Teduh yaitu :

1. Mengubah Lingkungan Kumuh Menjadi Tidak Kumuh (Melalui Perbaikan Kondisi Lingkungan).
2. Mencegah Timbulnya Permukiman Kumuh Melalui Peningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian
3. Pelibatan Partisipasi / Peran Serta Masyarakat Secara Aktif Di Dalam Program Pencegahan Kawasan Kumuh Dan Penanggulangan Kemiskinan.

4. Mengangkat Potensi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Setempat.
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Manfaat Program Kampung Teduh sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Yang Baik dan Tertata.
2. Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Keluarga.
3. Membentuk Trademark Lingkungan Melalui Tematik Yang Diangkat Sehingga Menjadi Ikon Wilayah dan Dapat Memberikan Pengaruh Positif Pada Warga Setempat Seperti Perubahan Mindset Dan Perilaku Warga Untuk Lebih Peduli Terhadap Lingkungan.
4. Memberikan Pengaruh Positif Bagi Kampung-Kampung Lainnya di Kelurahan Tersebut Maupun di Kelurahan Lain Agar Terpacu dan Terpacu Untuk Mewujudkan Kampung Teduh Serupa.
5. Menuju Masyarakat Kota Magelang Yang Semakin Sejahtera dan Mencegah Tumbuhnya Kawasan Kumuh dan Angka Kemiskinan di Kota Magelang.
6. Diharapkan Dapat Menggugah Para Pemberi Csr Untuk Mereplikasi Kampung Teduh di Kampung atau Kelurahan Wilayah Lain Di Kota Magelang.
7. Pemenuhan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Baik dan Tertata.
8. Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Keluarga.

9. Membentuk Trademark Lingkungan Melalui Tematik yang Diangkat Sehingga Menjadi Ikon Wilayah dan Dapat Memberikan Pengaruh Positif Pada Warga Setempat Seperti Perubahan Mindset dan Perilaku Warga untuk Lebih Peduli Terhadap Lingkungan.
10. Memberikan Pengaruh Positif Bagi Kampung-Kampung Lainnya di Kelurahan Tersebut Maupun di Kelurahan Lain Agar Terpacu dan Terpacu Untuk Mewujudkan Kampung Teduh Serupa.
11. Menuju Masyarakat Kota Magelang yang Semakin Sejahtera dan Mencegah Tumbuhnya Kawasan Kumuh dan Angka Kemiskinan di Kota Magelang.
12. Diharapkan Dapat Menggugah Para Pemberi Csr untuk Mereplikasi Kampung Teduh di Kampung atau Kelurahan Wilayah lain di Kota Magelang.

Prinsip Kampung Teduh

Beberapa Prinsip yang akan Menjadi Pedoman Perancangan dan Pertimbangan Penilaian adalah :

1. Unik, Kreatif dan Berbasis Karakteristik Lokal, Berdasar Potensi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Setempat
2. Lintas Sektoral dan Lintas *Stakeholder*
3. Tidak Hanya Memandang Perancangan Sebagai Sebuah Desain Fisik, Namun juga Memperhatikan Non-Fisik
4. Mendukung Slogan Magelang Kota Sejuta Bunga, Program Ruang Terbuka Hijau dan Menerapkan Prinsip Ekologis yang Memihak Kelestarian Lingkungan dan ‘Pengaruhnya’.
5. Dirancang Dengan Proses yang Melibatkan ‘Pengaruhnya’ Kawasan

6. Menyelesaikan Isu Prioritas, dengan Teknologi dan Bujet yang Sesuai dengan Kapasitas Daerah Tidak Sekedar Berdampak Instan, Namun Dapat Berkelanjutan Dampaknya Bagi Lingkungan dan Penghuninya